

**PELUANG SERTA HAMBATAN PENGEMBANGAN  
USAHA/INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI JAWA  
TENGAH**

**Shofia Nur A**

Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas Wahid Hasyim Semarang

**Abstract**

Middle and small industry development in Central Java very needed in supporting economics. Seen potency had by Central Java like : demography, infrastructure, job generation/human resource, developed competent middle and small industry, more than anything else small and middle industry in agricultural sector. Because effort in agricultural sector have some its, is more can stay at condition of economic crisis, can permeate big labour relative, and its role in forming of domestic earnings of bruto. Active and effort support from central government and also local government very expected in course of its. Problems of educated unemployment also require be paid attention, considering college grad also represent expected by human resource is its role in development.

Keyword : *Middle and small industry, Central Java, Labour force, Educated unemployment.*

**Pendahuluan**

Kemakmuran suatu negara bisa dinilai dari kemampuan negara tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa yang berguna dan mendistribusikan keseluruh penduduk. Semakin maju suatu negara semakin banyak orang yang terdidik dan banyak pula orang menganggur maka semakin dirasakan pentingnya dunia wirausaha. Pembangunan akan lebih mantap jika ditunjang oleh wirausahawan karena kemampuan pemerintah sangat terbatas. Pemerintah tidak akan mampu menggarap semua aspek pembangunan karena sangat banyak membutuhkan anggaran belanja, personalia, dan pengawasannya.

Suatu pernyataan yang bersumber dari PBB menyatakan bahwa suatu negara akan mampu membangun apabila memiliki wirausahawan sebanyak 2 persen dari jumlah penduduknya. Jadi jika negara Indonesia berpenduduk 200 juta jiwa, maka wirausahawannya harus lebih kurang

sebanyak 3 juta. Tentu bagian terbesarnya adalah kelompok kecil – kecil yang belum terjamin mutunya dan belum terjamin kelangsungan hidupnya (kontinuitasnya). Dan di Jawa Tengah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2005, jumlah angkatan kerja mencapai 16,63 juta orang atau naik sebesar 4,13 persen dibandingkan tahun 2004. Dengan angka ini, tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk di Jawa Tengah tercatat sebesar 60,88 persen, sedangkan angka pengangguran di Jawa Tengah relatif kecil yaitu sebesar 5,88 persen.

Adapun menurut status pekerjaan utamanya, sebagian besar sebagai buruh/karyawan (29,05 persen), sedangkan yang berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap sebesar (18,24 persen), berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain (20,64 persen), berusaha sendiri dibantu buruh tetap (3,25 persen) dan pekerja lainnya (288,82 persen).

Masih mengutip data BPS, menurut Agus (dalam Modjo, M. Ikhsan) angka pengangguran lulusan universitas di Indonesia telah mencapai sekitar 385.000 orang pada tahun 2005. Dan dari kecenderungan yang ada, bukan mustahil angka tersebut telah menembus 400.000 orang pada tahun 2006. Padahal angka ini belum termasuk mereka yang setengah menganggur, dalam arti bekerja dengan jam kerja kurang atau memiliki produktivitas rendah. Lesunya dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Kesempatan kerja yang terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka pengangguran sarjana di Indonesia.

Pembangunan di sektor industri merupakan prioritas utama pembangunan ekonomi tanpa mengabaikan pembangunan di sektor lain. Di Jawa Tengah banyak terdapat usaha – usaha kecil baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Menurut Dinas perindustrian dan perdagangan propinsi Jawa Tengah, terdapat sekitar 643,95 ribu perusahaan industri kecil dan menengah pada tahun 2005 atau meningkat relatif kecil dibandingkan jumlah perusahaan tahun sebelumnya. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebanyak 2,64 juta orang. Tabel berikut menunjukkan banyaknya perusahaan/ unit usaha menurut jenis industri di Jawa Tengah.

Tabel 1. Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu di Jawa Tengah Tahun 2005

No	Kabupaten	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja				Jumlah
		Bekerja	MP	Sub Jumlah	Sekolah	MRT	Lainnya	Sub Jumlah	
01	Kab. Cilacap	671,210	78,117	749,327	208,691	244,471	136,363	589,525	1,338,852
02	Kab. Banyumas	689,850	36,359	726,209	218,175	219,177	114,571	551,923	1,278,132
03	Kab. Purbalingga	386,859	15,447	402,306	106,290	124,479	69,057	299,826	702,132
04	Kab. Banjarnegara	426,180	29,310	455,490	116,825	124,614	38,883	280,322	735,812
05	Kab. Kebumen	502,926	31,553	534,479	179,798	164,575	103,586	447,959	982,438
06	Kab. Purworejo	337,933	14,189	352,122	97,201	97,788	53,770	248,759	600,881
07	Kab. Wonosobo	400,729	12,033	412,762	80,885	99,638	41,111	221,634	634,396
08	Kab. Magelang	549,552	35,512	585,064	170,145	157,923	70,262	398,330	983,394
09	Kab. Boyolali	502,366	26,849	529,215	123,536	105,642	35,683	264,861	794,076
10	Kab. Klaten	604,888	27,797	632,685	126,025	103,899	115,828	345,752	978,437
11	Kab. Sukoharjo	407,445	33,771	441,216	129,072	84,656	55,361	269,089	710,305
12	Kab. Wonogiri	527,299	35,363	562,662	122,423	126,556	56,875	305,854	868,516
13	Kab. Karanganyar	443,724	24,864	468,588	105,056	93,536	38,462	237,054	705,642
14	Kab. Sragen	436,622	19,545	456,167	120,734	87,552	74,056	282,342	738,509
15	Kab. Grobogan	700,076	25,630	725,706	139,965	161,620	57,722	359,307	1,085,013
16	Kab. Blora	435,108	12,900	448,008	103,515	111,535	45,006	260,056	708,064
17	Kab. Rembang	274,422	16,752	291,174	64,922	97,760	37,166	199,848	491,022
18	Kab. Pati	604,896	26,242	631,138	156,148	147,384	84,836	388,368	1,019,506
19	Kab. Kudus	393,626	21,821	415,447	115,029	66,411	42,261	223,701	639,148
20	Kab. Jepara	518,014	23,768	541,782	144,864	135,408	62,066	342,338	884,120
21	Kab. Demak	467,826	31,439	499,265	177,888	135,827	49,415	363,130	862,395
22	Kab. Semarang	500,896	25,200	526,096	83,462	77,314	65,804	226,580	752,676
23	Kab. Temanggung	389,337	14,373	403,710	88,161	78,756	29,859	196,776	600,486
24	Kab. Kendal	445,515	21,615	467,130	104,815	106,675	53,300	264,790	731,920
25	Kab. Batang	327,212	24,350	351,562	85,166	95,014	56,628	236,808	588,370
26	Kab. Pekalongan	400,745	25,350	426,095	125,374	95,142	50,897	271,413	697,508
27	Kab. Pemalang	596,701	42,854	639,555	200,383	211,845	83,333	495,561	1,135,116
28	Kab. Tegal	632,384	51,277	683,661	217,333	199,295	104,404	521,032	1,204,693

**Shofia Nur A****Peluang Serta ...**

29	Kab. Brebes	849,566	62,656	912,222	210,545	210,689	159,143	580,377	1,492,599
30	Kota Magelang	54,346	8,294	62,640	20,126	20,822	8,120	49,068	111,708
31	Kota Surakarta	237,888	18,644	256,532	101,480	70,564	29,736	201,780	458,312
32	Kota Salatiga	73,987	9,605	83,592	31,210	25,264	8,625	65,099	148,691
33	Kota Semarang	633,432	65,584	699,016	260,400	173,312	83,312	517,024	1,216,040
34	Kota Pekalongan	124,993	17,689	142,682	36,585	41,804	17,197	95,586	238,268
35	Kota Tegal	106,750	12,200	118,950	35,868	36,234	15,250	87,352	206,302
	<b>Jumlah</b>	15,655,303	978,952	16,634,255	4,408,095	4,133,181	2,147,948	10,689,224	27,323,479

MP : Mencari Pekerjaan

MRT : Mengurus Rumah tangga

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2006

Tabel 2. Banyaknya perusahaan/unit usaha menurut jenis industri di Jawa Tengah tahun 2001 – 2005

No	Jenis Industri	2001	2002	2003	2004	2005
1	Agro Industri	324.662	324.619	324.709	324.778	324.796
	- Besar	223	220	225	254	262
	- Kecil & Menengah	324.399	324.399	324.484	324.524	324.534
2	Industri	319.574	319.599	319.645	319.660	319.905
	- Besar	469	469	470	472	486
	- Kecil & Menengah	319.105	319.130	319.175	319.188	319.419
	Jumlah					
	- Besar	692	689	695	726	748
	- Kecil & Menengah	643.504	643.529	643.659	643.712	693.953
	Total	644.196	644.218	644.354	644.438	644.701

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2006

Dari tahun 2001 jumlah industri besar serta kecil dan menengah, mengalami peningkatan. Peningkatan yang relatif besar terjadi dalam industri kecil dan menengah baik jenis industri maupun agroindustri. Dan dari jumlah industri yang ada, jumlah perusahaan di Jawa Tengah yang mendapat SIUP menurut skala usahanya (perusahaan besar, menengah, dan kecil) pada tahun 2005 sejumlah 18,312 perusahaan. Pada keadaan yang sama jumlah perusahaan yang mendapat TDP (Tanda Daftar Perusahaan) naik 18,17 persen, dari 14.581 pada tahun 2004 menjadi 17.230 perusahaan pada tahun 2005.

Maka dari data diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu (1) Apa yang menjadi potensi dan hambatan dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah sehingga dapat meminimalkan jumlah pengangguran ? (2) Usaha apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan jumlah pengangguran terdidik (pengangguran lulusan universitas) ?

## Bahan dan Metode

Metode yang digunakan dalam menyusun tulisan ini adalah metode deskripsi analitis yang memfokuskan pada pemecahan masalah aktual dilapang serta berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur.

Pembahasan masalah dengan menggunakan studi pustaka dan data sekunder dengan sumber informasi. Studi pustaka yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam persoalan kemudian diusulkan alternatif pemecahan masalah.

## Hasil dan Pembahasan

### Usaha/Industri

Yang dimaksud dengan usaha adalah suatu unit ekonomi yang melakukan dengan tujuan menghasilkan barang/jasa untuk dijual atau ditukar dengan barang lain dan ada seorang atau lebih yang bertanggungjawab dengan mempunyai kewenangan untuk mengelola usaha tersebut.

Usaha rumahtangga adalah usaha anggota rumahtangga yang dilakukan pada lokasi/tempat yang tidak tetap (keliling) ataupun dilakukan pada suatu lokasi tetap namun tempat perlengkapan usahanya dipindah- pindahkan (tidak tetap).

Usaha kecil dan usaha rumahtangga yang terdapat di semua sektor merupakan usaha yang banyak memberikan lapangan usaha tanpa harus mempunyai jenjang pendidikan maupun keahlian khusus, sehingga secara nasional dari usaha ini banyak sumbangannya terhadap produk domestik bruto.

Badan Pusat Statistik menggolongkan perusahaan usaha industri pengolahan di Indonesia ke dalam 4 kategori berdasarkan jumlah pekerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan tanpa memperhatikan besarnya modal yang ditanam ataupun kekuatan mesin yang digunakan. 4 kategori tersebut adalah :

#### 1. Industri kerajinan rumahtangga

Yaitu : perusahaan / usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 1 – 4 orang.

#### 2. Industri kecil

Yaitu : perusahaan / usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 5 - 19 orang.

#### 3. Industri sedang

Yaitu : perusahaan / usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 20 - 99 orang.

#### 4. Industri besar

Yaitu : perusahaan / usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja sebanyak 100 orang atau lebih.

Peluang serta Hambatan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah di Jawa Tengah

Peluang dan hambatan pengembangan industri kecil dan menengah di Jawa Tengah, Pertama dilihat dari wilayah Jawa Tengah. Secara administratif di Jawa Tengah terdapat 29 kabupaten dan 6 kota. Jawa Tengah memiliki luas wilayah 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas wilayah Pulau Jawa (1,70 persen dari luas wilayah Indonesia). Luas wilayah terdiri dari 996 ribu hektar (30,60 persen) lahan sawah dan 2,26 juta hektar (69,40 persen) bukan lahan sawah. Dengan jumlah penduduk mencapai 27,33 juta jiwa, menjadi aset bagi pembangunan ekonomi wilayah Jawa Tengah melalui pengembangan industri kecil dan menengah. Berdasarkan data BPS tahun 2005, jumlah penduduk yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Penduduk yang Bekerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Tengah Tahun 2005

No	Lapangan Pekerjaan	Jumlah (jiwa)
1	Pertanian	5,875,292
2	Pertambangan & galian	92,258
3	Industri	2,596,815
4	Listrik, gas & air bersih	21,458
5	Konstruksi	1,019,306
6	Perdagangan	3,429,845
7	Komunikasi	713,670
8	Keuangan	140,383
9	Jasa	1,748,173
10	Lainnya	18,103
	<b>Total</b>	<b>15,655,303</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), 2006

Sebagian besar penduduk Jawa Tengah bekerja di lapangan pekerjaan pertanian atau sebesar 37,5 persen dari angkatan kerja yang bekerja. Berarti pengembangan industri/usaha disektor pertanian mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Selain itu, sektor pertanian adalah mesin penggerak perekonomian Jawa Tengah. Sektor pertanian yang dimaksud yaitu subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan. Didukung dengan data yang menyatakan jumlah pengusaha dan jumlah industri kecil maupun menengah yang meningkat,

membuktikan jika : (1). usaha di sektor pertanian relatif lebih mampu bertahan pada kondisi krisis ekonomi dan bahkan mampu berkembang dengan pertumbuhan yang relatif cepat pula, (2). usaha kecil dan menengah di sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja dengan peningkatan yang relatif lebih besar, (3). Usaha kecil dan menengah mampu meningkatkan peranannya dalam pembentukan PDB.

Dan dengan terletak diantara dua propinsi yaitu propinsi Jawa Barat dan Jawa Timur maka dapat menjadi alasan bagi propinsi Jawa Tengah sarat akan perkembangan dan sangat terbuka bagi pembangunan. Jawa Tengah berada tepat dipersimpangan jalan dunia. Keuntungan dari faktor geografis ini menjanjikan akses pasar yang sangat mudah ke berbagai penjuru dunia.

**Kedua, pendidikan.** Sumberdaya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi, yakni bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Dalam kaitan tersebut setidaknya ada dua hal penting menyangkut kondisi SDM Indonesia secara umum, yaitu : (1) adanya ketimpangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (*open unemployment*). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini berjumlah sekitar 8 juta. (2) tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar yaitu sekitar 63,2 %. Sedangkan di Jawa Tengah, pada tahun 2005 penduduk yang menamatkan SD sejumlah 18,280,012 jiwa, tamat SLTP sebanyak 4,526,870 jiwa, dan tamat jenjang pendidikan SLTA ke atas sejumlah 4,416,597 jiwa. Pendidikan dasar masih mendominasi.

Untuk menciptakan SDM berkualitas dan handal yang diperlukan adalah pendidikan. Sebab dalam hal ini pendidikan dianggap sebagai mekanisme kelembagaan pokok dalam mengembangkan keahlian dan pengetahuan. Pendidikan merupakan kegiatan investasi di mana pembangunan ekonomi sangat berkepentingan. Sebab bagaimanapun pembangunan ekonomi membutuhkan kualitas SDM yang unggul baik dalam kapasitas penguasaan IPTEK maupun sikap mental, sehingga dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam



SDM semakin menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan merupakan tuntutan yang harus dikedepankan.

**Ketiga, infrastruktur.** Ketersediaan sarana transportasi Jawa Tengah dengan provinsi, pulau, bahkan dengan negara lain. Melalui jalan darat, Jawa Tengah dihubungkan dengan jalur kereta api dan jalan provinsi. Panjang jalan utama sepanjang 26,31 ribu kilometer. Tetapi berdasarkan data BPS pada tahun 2005 sepanjang 4,678.69 kilometer jalan di Jawa Tengah rusak dan sepanjang 2,449.56 kilometer dalam kondisi rusak berat. Masalah ini jika tidak cepat dibenahi, dapat menjadi hambatan dalam pengembangan industri kecil maupun menengah. Pembinaan infrastruktur yang rusak berat dengan melibatkan pemerintah daerah dapat dimulai dari kabupaten yang memiliki angkatan kerja lebih besar di sektor – sektor tertentu. Seperti kabupaten Brebes, Tegal, Grobogan, Cilacap, Klaten yang merupakan daerah unggulan di sektor pertanian. Sedang untuk Kabupaten Jepara, Kudus, Pekalongan dan kota Semarang termasuk daerah yang angkatan kerjanya banyak di sektor industrinya. Sedangkan melalui jalur penerbangan, terdapat dua bandara di Jawa Tengah, Bandara Internasional Solo dan bandara domestik Semarang. Melalui jalur laut, Pelabuhan laut yang strategis ada di Semarang, Cilacap dan Tegal. Selain itu sarana pendidikan di Jawa Tengah terdapat universitas/akademik yang pada tahun akademik 2005/2006 tercatat sebanyak 223 terdiri dari 5 PTN dan 218 PTS. Dari universitas/akademik negeri dan swasta yang berkualitas diharapkan menghasilkan angkatan/tenaga kerja profesional berkualitas yang memenuhi kebutuhan pasar kerja. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2005/2006 jumlah mahasiswa dan dosen PTN di Jawa Tengah mengalami penurunan menjadi sebesar 112,002 ribu mahasiswa dan 7,46 ribu dosen. Hal ini bisa akibat dari mahalnya biaya pendidikan dan juga tingginya biaya kebutuhan hidup, sehingga secara logika seseorang akan mengutamakan kebutuhan hidupnya terlebih dahulu daripada kebutuhan pendidikan.

**Keempat, perizinan.** Masalah perizinan usaha, saat ini paling menjadi masalah bagi kalangan pengusaha kelompok usaha kecil dan menengah (UKM). Dalam kondisi ekonomi yang masih sulit saat ini, gerakan kelompok UKM jadi terhambat, bahkan sebelum mereka beroperasi karena harus memikirkan persyaratan yang diminta untuk membuat surat izin. Dan terlalu banyaknya jenis izin. Selain HO dari pemma, Departemen Perindustrian dan Perdagangan juga mengeluarkan Tanda Daftar Usaha Perdagangan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Industri, Surat Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda

Daftar Perusahaan. Berbagai perizinan itu sampai sekarang juga masih belum jelas apakah sekarang ditangani bagian perekonomian pemda atau dinas. Bahkan para pengusaha kecil sebenarnya menghendaki agar prosedur pengurusan perizinan usaha diganti menjadi pendaftaran saja. Dengan cara itu, diharapkan prosedurnya tidak rumit dan berbelit, sehingga bisa merangsang pertumbuhan dan perkembangan usaha. Implikasinya, pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat.

Sedangkan jumlah industri di Jawa Tengah sebanyak 644.701 yang sudah memiliki SIUP baru 18,312 perusahaan. Dan perusahaan yang mendapat TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 17.230 perusahaan pada tahun 2005. Apabila birokrasi perijinan dipermudah dan tidak berbelit – belit, bukan tidak mungkin jumlah industri/perusahaan kecil dan menengah yang mendapat SIUP dan TDP akan meningkat.

Usaha untuk Meminimalisir Pengangguran Terdidik.

Fenomena pengangguran terdidik sebagaimana fenomena pengangguran pada umumnya adalah hal yang erat terkait dengan kondisi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Bagi pekerja terdidik secara lebih spesifik fenomena ini bisa dijelaskan oleh kondisi lapangan pekerjaan di sektor formal. Satu sektor ketenagakerjaan yang sarat dengan regulasi yang sampai saat ini masih mengundang banyak kontroversi. Rendahnya alokasi APBN untuk sektor pendidikan - tidak lebih dari 12% - pada pemerintahan di era reformasi. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap perbaikan kualitas SDM. Padahal sudah saatnya pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah secara serius membangun SDM yang berkualitas. Sekarang bukan saatnya lagi Indonesia membangun perekonomian dengan kekuatan asing. Tapi sudah seharusnya bangsa Indonesia secara benar dan tepat memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki (*resources base*) dengan kemampuan SDM yang tinggi sebagai kekuatan dalam membangun perekonomian nasional. Orang tidak bekerja atau pengangguran merupakan masalah bangsa yang tidak pernah selesai. Ada tiga hambatan yang menjadi alasan kenapa orang tidak bekerja, yaitu hambatan kultural, kurikulum sekolah, dan pasar kerja. Hambatan kultural yang dimaksud adalah menyangkut budaya dan etos kerja. Sementara yang menjadi masalah dari kurikulum sekolah adalah belum adanya standar baku kurikulum pengajaran di sekolah yang mampu menciptakan dan mengembangkan kemandirian SDM yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sedangkan hambatan pasar kerja

lebih disebabkan oleh rendahnya kualitas SDM yang ada untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Usaha - usaha yang dapat dilakukan oleh *stake holder* pembangunan ekonomi Indonesia, diantaranya :

(1). Pembinaan kelenturan pasar kerja

Penyebab pengangguran tenaga kerja dengan lulusan universitas di Indonesia tidak lain tidak bukan adalah kekakuan pasar kerja formal sehingga upaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terdidik harus difokuskan pada upaya pembinaan kekakuan di pasar kerja formal ini. Dalam pasar kerja yang fleksibel, tingkat upah akan menyesuaikan dan bergerak turun bila terdapat kelebihan pasokan tenaga kerja. Sebaliknya, tingkat upah akan naik bila ada kekurangan pasokan. Dengan demikian, dalam pasar kerja yang lentur persoalan pengangguran akan dapat sedikit teratasi walaupun tidak seluruhnya.

Mekanisme upah sulit diharapkan untuk bekerja menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor formal dewasa ini di Indonesia. Sebab, selain adanya ketentuan upah minimum yang diberlakukan dengan cukup ketat di berbagai daerah, aneka peraturan lain, seperti ketentuan tentang pesangon, dalam banyak hal membatasi kelenturan tingkat upah untuk menyesuaikan terhadap kondisi pasar kerja formal di Indonesia. Di satu sisi, regulasi di pasar kerja formal memberikan perlindungan lebih kepada para tenaga kerja, terutama mereka yang sudah masuk di dalamnya. Di sisi lain, beragam peraturan ini juga menyebabkan kekakuan yang pada gilirannya membatasi jumlah pekerja yang dapat tertampung di sektor formal sehingga merugikan mereka yang belum terserap ke dalam pasar kerja. Tentu saja sebagian besar dari mereka adalah tenaga terdidik yang masih muda dan minim pengalaman (*fresh graduates*).

Pada saat yang sama, pembinaan infrastruktur yang menjembatani dunia kerja dan dunia pendidikan tentu juga harus dilakukan. Dengan catatan pembinaan ini bukan untuk mengutak-atik sistem dan orientasi pendidikan yang sudah ada, yang malah dapat berisiko mempernyam keadaan.

(2) Program magang kerja

Magang kerja adalah salah satu metode pelatihan yang efektif bagi mahasiswa guna mengasah ketrampilan kerja dan ketrampilan usaha. Dari magang kerja tersebut mahasiswa dapat menggali informasi dari pemilik dan karyawan perusahaan tempat mereka magang.

Fenomena meningkatnya angka pengangguran sarjana seyogyanya perguruan tinggi ikut bertanggungjawab. Fenomena pengangguran sarjana merupakan kritik bagi perguruan tinggi, karena ketidakmampuannya dalam menciptakan iklim pendidikan yang mendukung kemampuan wirausaha mahasiswa.

Ada beberapa manfaat yang didapat dari pelaksanaan program magang, yaitu: (1). Keberhasilan program ini dapat meningkatkan *performance* perguruan tinggi di mata masyarakat, karena kemampuan alumninya dalam menciptakan lapangan kerja baru dan berjiwa *enterpreneurship*, (2). Keberhasilan program magang dapat dijadikan sebagai salah satu model untuk peningkatan kualitas lulusan perguruan tinggi

Problem utama dalam pembangunan sumberdaya manusia adalah terjadinya *missallocation of human resources*. Pada era sebelum reformasi, pasar tenaga kerja mengikuti aliran ekonomi konglomeratif. Di mana tenaga kerja yang ada cenderung memasuki dunia kerja yang bercorak konglomeratif yaitu mulai dari sektor industri manufaktur sampai dengan perbankan. Dengan begitu, dunia pendidikan akhirnya masuk dalam kemelut ekonomi politik, yakni terjadinya kesenjangan ekonomi yang diakselerasi struktur pasar yang masih terdistorsi. Kenyataan menunjukkan banyak lulusan terbaik pendidikan masuk ke sektor-sektor ekonomi yang justru bukannya memecahkan masalah ekonomi, tapi malah memperkuat proses konsentrasi ekonomi dan konglomerasi, yang mempertajam kesenjangan ekonomi. Hal ini terjadi karena visi SDM terbatas pada struktur pasar yang sudah ada dan belum sanggup menciptakan pasar sendiri, karena kondisi makro ekonomi yang memang belum kondusif untuk itu. Keterpurukan ekonomi secara nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Dengan adanya program magang kerja yang sesuai dengan pendidikan yang ditekuni, juga diharapkan lulusan perguruan tinggi mampu menjadi penengah bukannya mempertajam kesenjangan ekonomi.

## Kesimpulan

Pengembangan industri kecil dan menengah di Jawa Tengah mempunyai peluang cukup besar jika disertai dengan meminimalan hambatan pengembangannya. Adanya upaya aktif dari pemerintah pusat maupun daerah serta kerjasama yang solid antara *stake holder* sangat

diperlukan, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan SDM dan teknologi, perbaikan sistem pendidikan dan kebijakan makro yang bersahabat dengan sektor pertanian. Apalagi industri kecil dan menengah di sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian. Dengan didukung letak geografis, fasilitas dan jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah, pengembangan industri kecil dan menengah dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Jawa Tengah, baik dari PDB dan ekspor maupun pengurangan tingkat pengangguran. Dan pengurangan tingkat pengangguran terdidik dapat diminimalisir dengan pembenahan kelenturan pasar kerja/mekanisme pasar dan adanya program magang kerja.

### Daftar Pustaka

- Anonimous, 2004, **Statistik Industri Kecil dan Kerajinan Rumahtangga Tahun 2004**, Badan Pusat Statistik Indonesia, Jakarta.
- Anonimous, 2006, **Jawa Tengah Dalam Angka 2006**, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, Semarang.
- Anonimous, - , **Perijinan Usaha Hambat Perkembangan Pengusaha Kecil**, Harian Kompas.
- Bona, Frans, 2005, **Peluang Bisnis & Investasi di Berbagai Daerah Otonomi**, Restu Agung, Jakarta.
- Damanhuri, Didin S, **SDM Indonesia dalam Persaingan Global**, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0306/13/opi01.html>.
- Ludigdo, Unti.dkk, 2000, **Menciptakan Wirausaha Baru di Bidang Jasa Konsultasi Bisnis Melalui Program Magang Kewirausahaan Mahasiswa, Mitra Akademika**, Unibraw, Jember.
- Suryabrata, Sumadi, 1988, **Metodologi Penelitian**, CV. Rajawali, Jakarta.
- Widodo, Sri, 2003, **Peran Agribisnis Usaha Kecil dan Menengah untuk Memperkokoh Ekonomi Nasional**, Liberty, Yogyakarta.